
**EVALUASI PROGRAM FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASINS
DI KABUPATEN PANDEGLANG****Arif Nugroho^{1*}, Agus Lukman Hakim², Pryo Handoko³, Natta Sanjaya⁴, Ipah Mulyani⁵, Ade Hadiono⁶**^{1,2,3,4,5,6}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, IndonesiaEmail: ^{1*}ariyul88@gmail.com, ²aguslukman091@gmail.com, ³pyohandoko69@gmail.com,⁴nattasanjaya88@gmail.com, ⁵ipahfury12@gmail.com, ⁶bah.ade67@gmail.com***Penulis Korespondensi**

ABSTRAK

Permasalahan banjir dan erosi adalah fenomena alam yang sangat berpengaruh kepada masyarakat. Kerugian akibat dari kejadian tersebut dapat menurunkan kualitas hidup manusia dari berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu adanya penatalaksanaan segera dengan berbagai strategi. Salah satu diantaranya adalah evaluasi program *flood management in selected river basins* di Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi program *farmland management and sustainable agriculture practices for flood management in selected river basins sector project* Kabupaten Pandeglang dengan perspektif model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) serta merekomendasikan strategi keberlanjutan. Penelitian deskriptif kualitatif ini menunjukkan hasil bahwa adanya program FMSRB mampu menjawab berbagai masalah lahan-lahan kritis dan resiko banjir. Kemudian strategi keberlanjutan yang paling efektif yang harus dilakukan dilakukan pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan strategi *Collaborative Governance* yakni kolaborasi antara pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta, perguruan tinggi/akademisi dan lain sebagainya. Kesimpulan dari penelitian adalah model evaluasi CIPP dapat menjawab penyebab utama terjadinya banjir di Kabupaten Pandeglang.

Kata Kunci: *evaluasi kebijakan, program fmsrb, strategi keberlanjutan*

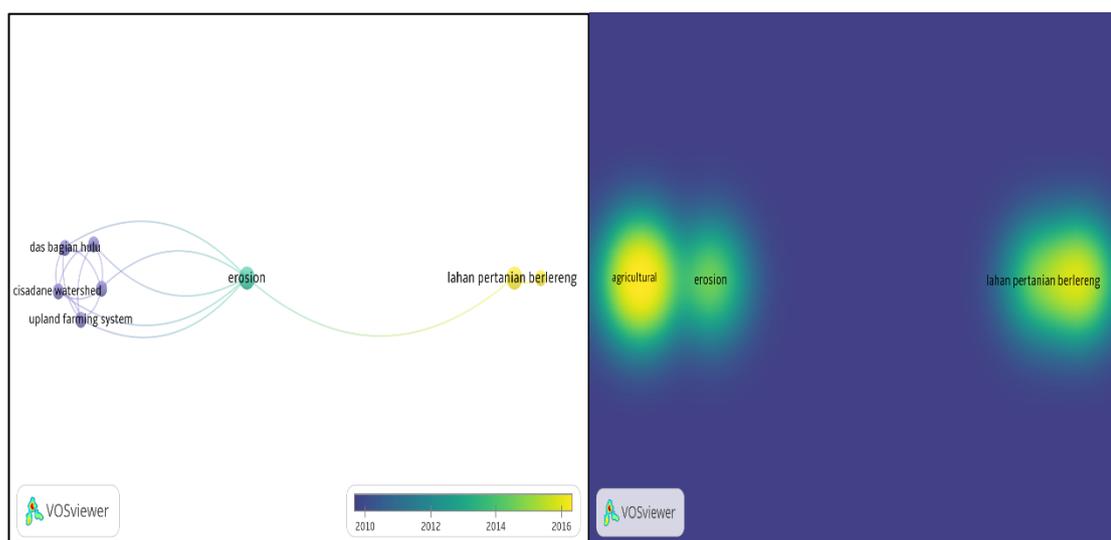
**EVALUATION OF THE FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASINS
PROGRAM IN PANDEGLANG REGENCY****ABSTRACT**

The problem of flooding and erosion is a natural phenomenon that greatly affects the community. Losses resulting from these events can reduce the quality of human life in various aspects of life. So there is a need for immediate management with various strategies. One of them is the evaluation of the flood management in selected river basins program in Pandeglang Regency. The purpose of this study was to evaluate the farmland management and sustainable agriculture practices for flood management in selected river Basins program sector project Pandeglang with the perspective of the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product) and to recommend sustainability strategies. The research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the existence of the FMSRB program was able to answer various problems with critical lands and flood risk. Then the most effective continuation strategy that must be carried out is carried out by the Pandeglang Regency government with a collaborative governance strategy, namely collaboration between the Regency government and the private sector, universities/academics, and so on. The conclusion of the research is that the CIPP evaluation model can answer the main causes of flooding in the Pandeglang Regency.

Keywords: *policy evaluation, FMSRB program, sustainability strategy*

PENDAHULUAN

Banjir dan erosi adalah fenomena alam yang membahayakan umat manusia. Diketahui terdapat 3 titik di Provinsi Banten yang langganan terdampak Banjir serta erosi yakni 3C (Cidanau, Ciujung, Cidurian) (kompas.tv, 2020). Penurunan Daerah Aliran Sungai (DAS) disebabkan MUT (Management Usaha Tani) yang lemah serta hutan gundul. Kondisi seperti itu di saat musim penghujan mendorong meningkatkan aliran air permukaan serta sedimentasi. Dikutip dari (Dinas Pertanian, 2022) berdasarkan fakta, langkah strategis yang seyogyanya dilakukan oleh pemerintah diantaranya (1) mitigasi risiko, (2) implementasi praktik bertani, (3) pemeliharaan hutan serta (3) konservasi tanah dan air. Kaitanya dengan itu, berdasarkan periode kajian yang bertemakan petani konservasi lahan rentang antara tahun 2010 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1: *Positioning Topic Riset*
 Sumber: Data diolah dari Crosef, 2022

Dari hasil pemetaan terlihat bahwa kajian penelitian tentang kemandirian petani konservasi lahan sedikit diteliti dari tahun 2010 s/d 2016, untuk tahun 2016 s/d 2022 belum ada lagi penelitian yang meneliti dengan tema dimaksud. Namun untuk penelitian dengan tema erosi lahan pertanian sudah ada beberapa penelitian terlihat dari warna kuning yang mencolok dari hasil pemetaan yang menunjukkan semakin terangnya warna dan semakin besarnya ukuran, maka menunjukkan tema tersebut sudah banyak diteliti.

Beberapa penelitian serupa yang melakukan pemetaan menggunakan aplikasi *Publish or Perish* (Rusdiyana, Nurwahyunani, A., & Marianti, 2021), (Sutrisno, N., Balitklimat, & Heryani, 2014), (Damara, 2017), (Wijayanto, H., Wibowo, A., & Anantayu, 2021). Akan tetapi, yang terfokus pada konservasi lahan di hulu dan implikasinya pada hilir DAS Ciujung-Cidurian-Cidanau belum ada yang pernah meneliti sama sekali.

Salah satu dari tiga yang disebutkan adalah sungai Ciujung. Sungai ini merupakan salah satu sungai yang memiliki kawasan DAS yang tergolong kritis di Pulau Jawa, dengan rasio debit air sungai maksimum (Q maks), dan minimum (Q min) 1.880. Debit maksimum

air sungai Ciujung tersebut 1.880 m³/detik, dan debit minimum 1 m³/detik (Kurnia Undang, 2011), ini menunjukkan bahwa pada musim hujan, volume air sungai sangat besar dan sering menyebabkan banjir di wilayah yang dilalui sungai tersebut serta menimbulkan genangan di bagian hilir DAS. Pada saat kemarau sungai tersebut berkurang airnya (kering). Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah DAS tersebut sudah tidak bisa lagi mengkonservasi air dengan baik. Bersamaan dengan banjir, terjadi pendangkalan sungai dan sedimentasi di bagian hilir DAS, sehingga akan mengurangi kapasitas tampung sungai tersebut.

Upaya pemanfaatan serta pemeliharaan tanah dan sumber daya air, difungsikan untuk proteksi, *recovery*, optimasi, dan *maintenance* fungsi tanah sesuai dengan karakteristik peruntukan lahan untuk mewujudkan pembangunan yang *Sustainable and Sustainable Living. Integrated Water Resources Management (IWRM)* diterapkan di Indonesia dengan *Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)* (Kompas.tv, 2020). Dalam hal ini FMSRB berlokus di Provinsi Banten meliputi kabupaten Serang dan Lebak. Metoda tersebut dimanifestasikan dengan pembentukan Organisasi Pengelolaan Wilayah Sungai (OPWS) serta desain Rencana Wilayah Sungai Strategis (RWSS), sebagai prasyarat untuk Rencana Pembangunan Wilayah Sungai (RPWS).

Sebagaimana dilansir dari (Kompas.tv, 2020) secara umum tujuan FMSRB yakni merekondisi lahan pertanian agar erosi terkendali dengan prinsip pengelolaan lahan secara baik. Selain itu tujuan FMSRB juga untuk meminimalisir limpasan dengan proteksi terhadap tanah dan air. Ekspektasi dari program FMSRB adalah peningkatan nilai tambah petani dalam pengelolaan DAS dengan pendekatan *agroforestry*, penanaman dan *maintenance* tanaman yang merupakan bagian dari perlindungan lahan kritis (Dinas Pertanian, 2022). Kegiatan utama dalam rangkaian kerja FMSRB (kompas.tv, 2020) (Dinas Pertanian, 2022) diawali dengan membentuk Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) kemudian penguatan kapasitas kelompok tani dalam hal teknis, ekonomi dan sosial. Kelompok tani yang menjadi sasaran dalam program FMSRB ini adalah kelompok tani yang memiliki komitmen berpartisipasi penuh dalam rangkaian kegiatan dan berkontribusi setidaknya 20 persen pada kegiatan konstruksi, operasi, serta *maintenance*. Kegiatan inti pada program FMSRB ini diantaranya pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, meliputi perpompaan, sumur resapan, dam parit, embung, dan perbaikan jaringan irigasi di pedesaan.

Evaluasi kebijakan dilakukan, karena tidak ada jaminan kebijakan atau program secara otomatis mencapai tujuan dengan mulus dan sempurna. Evaluasi kebijakan tujuannya untuk meneropong faktor yang menyebabkan gagalnya suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan juga bertujuan untuk mengetahui ketercapaian dampak dari implementasi dengan target yang ditetapkan oleh kebijakan (Winarno, 2014). Sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat, baik dalam aspek substansi, proses implementasi, maupun ketercapaian target atau kedalaman dampak yang ditimbulkan (Subarsono, 2005) (Budi Winarno, 2014). Sebagaimana dikutip dari (Dinas Pertanian, 2022) diketahui penerima manfaat dari program *exit strategy* menuju kemandirian petani adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Manfaat dimaksud adalah Peningkatan Kapasitas dan terberdayakannya masyarakat *Community Driven Development (CDD)* dalam program FMSAP for FMSRB Kabupaten Pandeglang.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi program FMSRB di Kabupaten Pandeglang dengan perspektif model evaluasi *CIPP (Context, Input, Process, Product)* (Stufflebeam, n.d.).

METODE

Penelitian yang disajikan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sendiri merupakan instrumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yang pertama Interview dengan aktor – aktor yang terlibat dengan program FMSRB diantaranya Pejabat Pelaksana Program dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Konsultan FMSRB dari Kementerian Pertanian, Fasilitator FMSRB Kabupaten dan Kelompok Tani yang selanjutnya kami inisialisasi dengan sebutan informan 1, informan 2 dan seterusnya, kemudian dengan observasi kegiatan pada program FMSRB yang telah dan sedang dilakukan. Observasi dilakukan terjadwal selama 3 bulan. Ketiga dengan studi dokumen yang yang relevan meliputi Peraturan Perundang Undangan, buku teks seperti Buku Pandeglang dalam angka 2022 yang diterbitkan BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pandeglang, artikel ilmiah, berita baik di media cetak maupun elektronik secara umum terkait konsep CIPP dan *Farmland Management and Sustainable Agriculture Practices for Flood Management in Selected River Basins Sector Project – FMSAP for FMSRB* di Kabupaten Pandeglang.

Data–data / fakta – fakta empiris *farmland management and sustainable agriculture practices for flood management in selected river basins sector project – FMSAP FMSRB* yang diperoleh, dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif yakni langkah – langkahnya meliputi (1) Kondensasi data (*data condensation*); (2) Penyajian data (*data display*); (3) Penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*). Miles, Huberman dan Saldana (2014) dikutip dari Nugroho & Habibi (2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

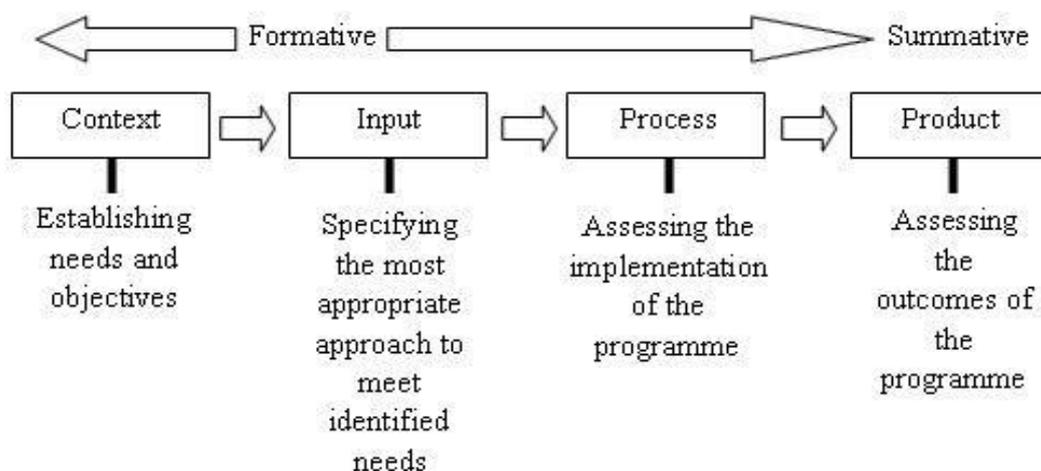
Evaluasi Kebijakan

Berbagai fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan (Maulana, Delly & Nugroho, 2019), yaitu memberikan informasi kinerja kebijakan yang valid dan dapat dipercaya, dan mengklarifikasi nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target kebijakan, dalam wujud kritik berserta rekomendasinya (Dunn, 2003). Dalam konsep analisis evaluatif retrospektif, evaluasi menilai sejauh mana efek awal yang diharapkan dari suatu kebijakan telah terealisasi, serta dampak yang terduga maupun tidak terduga yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut (Dunn, 2003) dan itu juga selaras dengan prinsip yang disarikan dari artikel Syahroni & Pribadi, (2023) kemudian Refinzar, Marpaung, Khairunnas, & Ismail (2023). Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan sering didefinisikan dengan sempit sebagai evaluasi dampak (Wibawa, 1994). Dengan kata lain Program FMSRB, (Dinas Pertanian, 2022) dikatakan gagal mencapai tujuannya jika fakta empiris di lapangan masih ditemui kondisi yang sama dengan permasalahan utama di DAS Ciujung yang meliputi (1) Luasnya

lahan kritis, (2) Luasnya hutan yang belum memenuhi standar kebutuhan lingkungan, (3) Banyak lahan kritis akibat kegiatan pertanian di luar area hutan tidak sejalan dengan kaidah konservasi, (4) Lunturnya budaya masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan serta lingkungan (5) Sumber daya air tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Evaluasi Program FMSAP for FMSRB

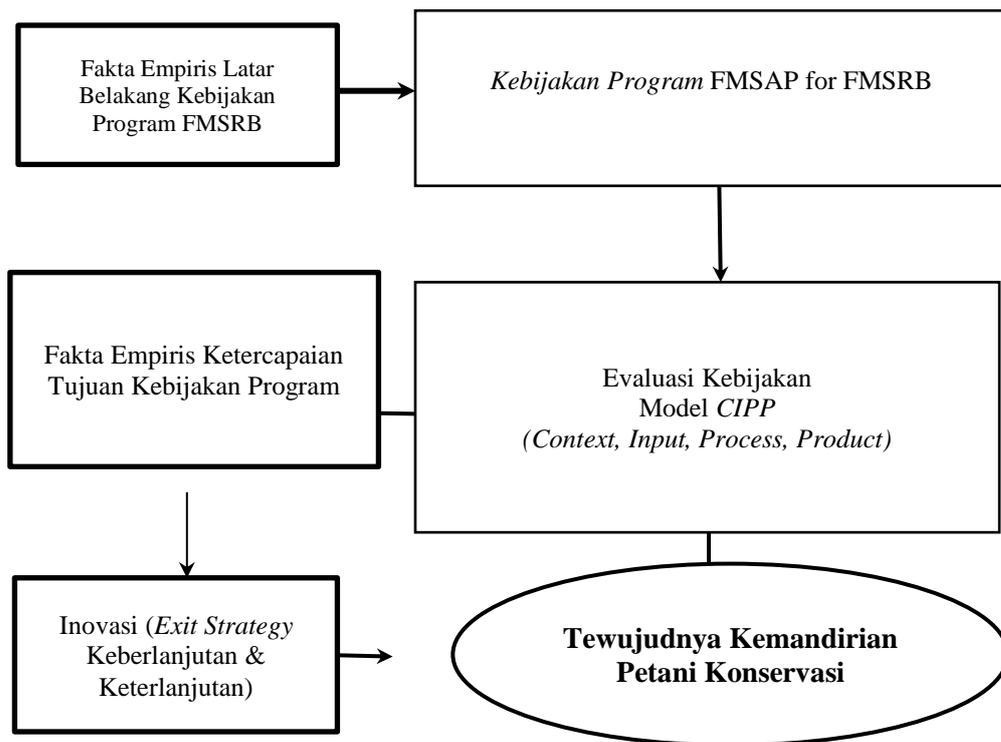
Evaluasi merupakan proses mendapatkan serta menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan (Stufflebeam, n.d.), sedangkan model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP) dianggap lebih komprehensif dibanding model evaluasi yang lainnya (Mufid, 2020). *Context, Input, Process, Product* dipahami sebagai sasaran evaluasi, yang merupakan komponen dari proses yang meliputi kebijakan dalam prosesnya diturunkan ke program dan program diturunkan menjadi beberapa kegiatan. *Context* yakni mengevaluasi kebijakan dari aspek konteks kebijakan. *Input* yakni mengevaluasi kebijakan dari aspek masukan kebijakan. *Process* yakni mengevaluasi kebijakan dari aspek proses kebijakan. *Product* yakni mengevaluasi kebijakan dari aspek hasil kebijakan (Siswadi, Houghty, & Agustina, 2020). Model CIPP dipandang sebagai sebuah sistem evaluasi (Maulana, Delly & Nugroho, 2019), (Mufid, 2020)(Siswadi et al., 2020) dengan gambaran pada Gambar 2.



Gambar 2: Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Sumber: (Stufflebeam, n.d.)

Muara dari evaluasi kebijakan FMSRB di sini adalah mengkomparasikan fakta permasalahan yang menggambarkan kondisi yang melatar belakangi adanya kebijakan program FMSRB dan fakta yang terjadi setelah program FMSRB dilaksanakan, apakah tujuan output dan dampak tercapai serta selanjutnya merumuskan *exit strategy* dan kemandirian petani konservasi yang merupakan bagian dari kegiatan studi keberlanjutan program - *Community Driven Development* (CDD) FMSRB. Terkait dengan itu, adapun diagramatik kerangka konseptual Evaluasi Kebijakan Program FMSAP for FMSRB, siperlihatkan pada Gambar 3.



Gambar 3: Kerangka Konseptual Evaluasi Kebijakan Program FMSAP – FMSRB

Sumber: Peneliti, 2022

Untuk melihat dan mengukur bagaimana evaluasi program *flood management in selected river basins* (FMSRB), maka dapat diukur melalui teori evaluasi kebijakan CIPP, meliputi *context*, yakni evaluasi konteks, *Input* yakni evaluasi pada input, *process* yakni evaluasi pada proses serta *product* yakni *evaluation* pada hasil (*Context, Input, Process, Product*), model evaluasi ini dikembangkan oleh (Stufflebeam, n.d.).

Context Evaluation (Evaluasi Terhadap Konteks)

Context evaluation (Stufflebeam, n.d.) adalah menilai, masalah-masalah, kebutuhan, oportunitas sebagai landasan dalam mendefinisikan tujuan dan prioritas serta menentukan hasil. *Context Evaluation* membahas tentang bagaimana perbaikan kondisi lahan pertanian untuk mengendalikan erosi melalui pengelolaan lahan yang semakin baik serta peningkatan kapasitas Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam kolaborasi perencanaan dan pengelolaan resiko banjir terpadu. (Tando, Sudarmo, & Haryanti, 2020) Governance Kolaboratif disini dimaksudkan terciptanya diseminasi otoritas dari *single actor* menjadi multi-aktor

Dari hasil olah data atau konstruksi data hasil wawancara dengan para informan, hasil observasi serta studi dokumen diketahui bahwa perencanaan pengelolaan yang dilakukan ditujukan untuk perlindungan, pemulihan peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah. Terdapat program *flood management risk protection*, dimana program tersebut sebagai antisipasi dari implementasi program *flood management in selected river basins* (FMSRB). Diperlukanya orkestrasi antar stakeholder pemerintahan. Collaborative terdapat

empat tahap yakni *assessment*, *initiation*, *deliberation* dan *implementation* (Ricardo S. Morse, 2012). Untuk perencanaan lahan yang akan menjadi sasaran program FMSRB, diuji lab terlebih dahulu oleh pihak konsultan Kementerian Pertanian, apakah tanah di lahan tersebut cocok untuk ditanami bibit tanaman/sayuran bagi program hibah bibit ataupun kondisi struktur tanah untuk program tanah terasering. Hal tersebut dilakukan guna kesesuaian kriteria penilaian antara kondisi lahan yang akan digunakan program FMSRB dengan permohonan kelompok tani. Hal itu merupakan perwujudan prinsip demokratisasi, namun birokrasi pemerintah tetap hadir menjadi katalis (Irawan Denny, 2017). Kemudian dari perencanaan yang dilakukan implikasinya ditujukan untuk mengurangi resiko banjir yang disebabkan salah satunya oleh racun (*hazard*), hal itu selaras dengan prinsip (Kurnia Undang, 2011).

Pada teknis pengelolaan perencanaan lahan dalam pelaksanaan program FMSRB ini, terdapat tim khusus yang melakukan uji lab dari Kementrian Pertanian dan PUPR. Jika kapasitas lahan meningkat resiko banjir pun mengecil. Selanjutnya mengenai apakah konsep tersebut akan sepenuhnya berhasil dan berjalan dengan baik. Tentunya dalam implementasi konsep tersebut perlu adanya pengembangan kapasitas para pelaksana program atau multi-aktor yang terlibat untuk memperkuat peran birokrasi pemerintah (Irawan Denny, 2017) (Abbott, Genschel, Snidal, & Zangl, 2016), salah satunya seperti para kelompok tani yang perlu dikembangkan kapasitasnya. Tidak bisa instan dalam menjalankan konsep perencanaan FMSRB ini, pendamping tentunya yang bertugas mendampingi setiap kelompok tani harus intens atau secara terus menerus melakukan upaya peningkatan kapasitas kelompok tani ketika pelaksanaan FMSRB ini.

Adapun dokumentasi pemeriksaan progres pertumbuhan tanaman dari hibah bibit program FMSRB seperti pada Gambar 4.



Gambar 4: Pemeriksaan Progres Pertumbuhan Hibah Bibit Program FMSRB

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Terkait teknis pengadaan bibit dalam program tersebut hanya diizinkan untuk melakukan lelang bibit tanaman yang sudah ditentukan oleh Konsultan Kementerian Pertanian seperti bibit durian, cabe, petai, alpukat, dan lain-lain. Bibit hasil lelang sebelum ditanam diteliti terlebih dahulu apakah bibit tersebut bagus atau tidak. Berikut sebagai contoh bibit durian dan alpukat) didokumentasikan seperti pada Gambar 5.



Gambar 5: Bibit Hibah FMSRB (Bibit Durian dan Alpukat)

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Berdasarkan hasil olah data atau konstruksi data hasil wawancara dengan para informan, hasil observasi serta studi dokumen dapat dikatakan bahwa prinsip serta tujuan dari program FMSRB dipandang sebagai perencanaan yang berprinsip dan bertujuan pada pencegahan risiko banjir. Hal ini tentu sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Salomo, Jannah, & Muslim, 2008) (Stufflebeam, n.d.) dimana *Context Evaluation* menilai, masalah-masalah, kebutuhan, oportunitas sebagai landasan dalam mendefinisikan tujuan dan prioritas serta menentukan hasil. Program FMSRB berprinsip pada perbaikan kondisi lahan pertanian untuk mengendalikan erosi melalui pengelolaan lahan yang semakin baik.

Input Evaluation (Evaluasi Terhadap Masukan)

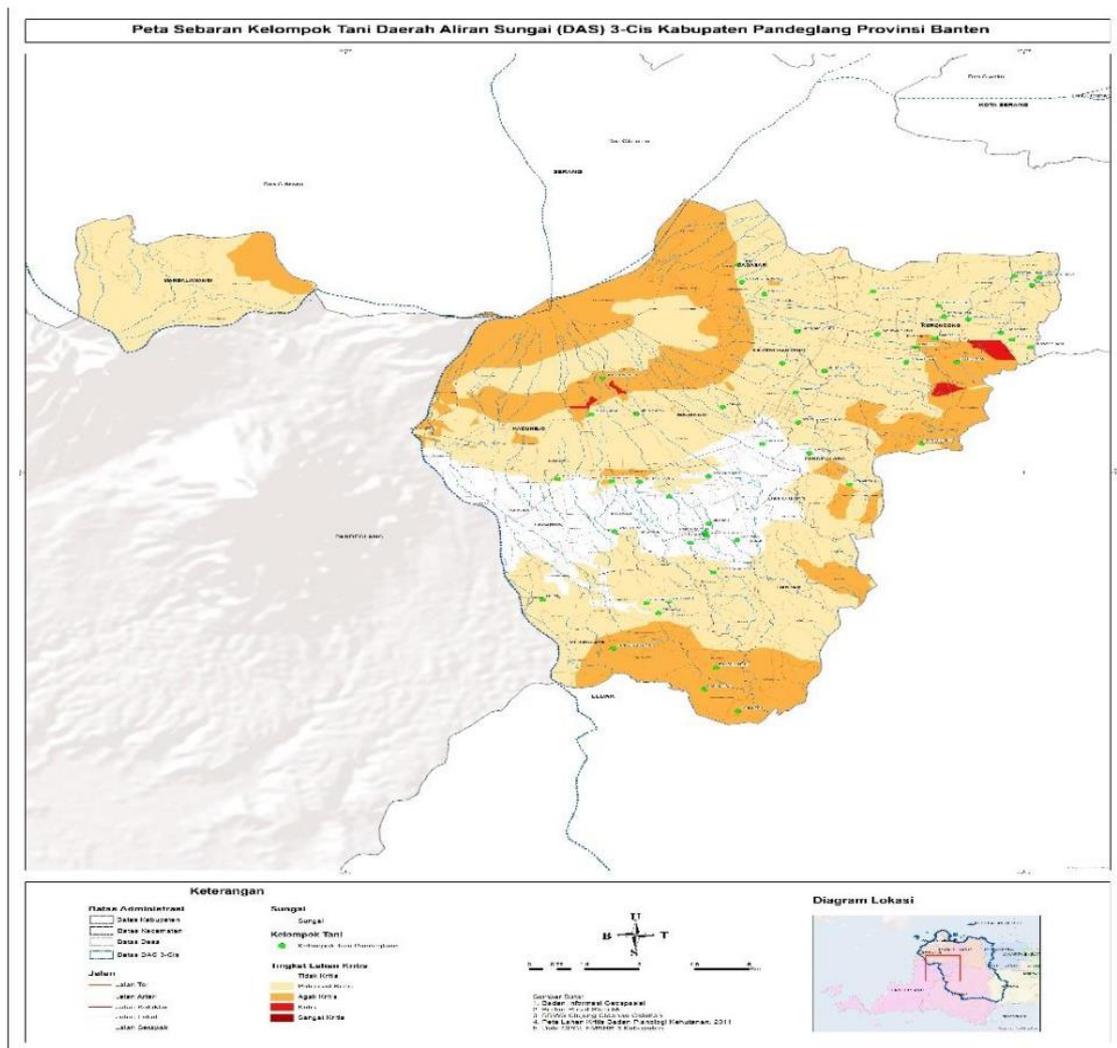
Input merupakan evaluasi terhadap masukan, dimana prinsipnya adalah memberikan penilaian terhadap alternatif yang digunakan kemudian menentukan instrumen serta menetapkan sumberdaya yang dibutuhkan dalam rancangan program. Membahas apa saja penetapan kegiatan petani mandiri dan bagaimana langkah-langkah struktural dan tindakan-tindakan non-struktural. Dari hasil olah data atau konstruksi data hasil wawancara dengan para informan, hasil observasi serta studi dokumen diketahui bahwa *flood management in selected river basins* (FMSRB), selain hibah bibit tanaman/sayuran kepada kelompok tani adapun program Jalan Usaha Tani (JUT), terasering, embung, jaringan irigasi, konstruksi pendukung lainnya. Sebagai contoh, pada Gambar 6 merupakan dokumentasi Embung Program FSMSRB.



Gambar 6: Embung Program FSMSRB

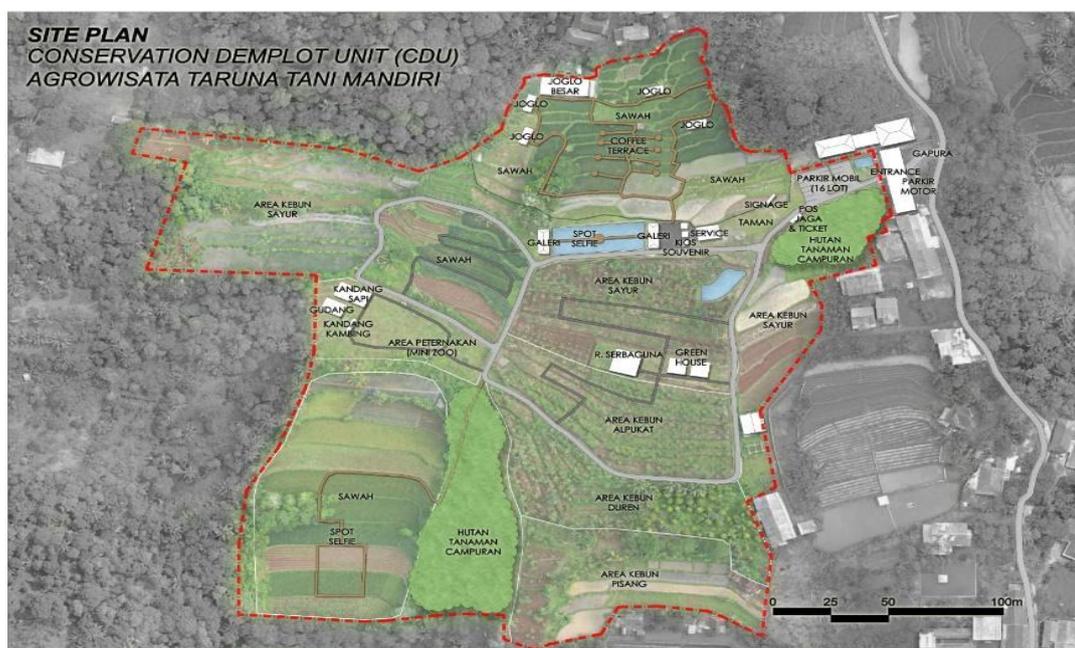
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Berdasarkan hasil olah data atau konstruksi data hasil wawancara dengan para informan, hasil observasi serta studi dokumen diketahui bahwa yang perlu diprioritaskan dan dilanjutkan dari program *flood management in selected river basins* (FMSRB) ketika berakhir yakni seperti kegiatan-kegiatan pemberdayaan petani, hibah bibit tanaman atau sayuran, pengelolaan lahan seperti terasering dan embung sampai pemberian akses jalan kepada petani ke lahan yang dinamakan Jalan Usaha Tani (JUT). Bahan pertimbangannya yakni dengan melihat peta wilayah lahan kritis, baru 11% dari tiga Kabupaten yang sudah tercover dari program FMSRB, selebihnya masih ada lahan kritis dan potensial kritis yang harus dicover FMSRB khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kemudian dalam progres program FMSRB yang sudah berjalan, sudah bisa dikatakan mampu mengendalikan banjir dan erosi dengan berpegang pada prinsip menunda terjadinya aliran permukaan, memperbesar atau meningkatkan kapasitas tanahnya dalam meresapkan air, dan mengurangi terjadinya pengikisan atau penghancuran permukaan tanah oleh erosi air hujan. Adapun peta lahan kritis Kabupaten Pandeglang yang dimaksud digambarkan pada Gambar 7.



Gambar 7: Peta Lahan Kritis Kabupaten Pandeglang
 Sumber: (Dinas Pertanian, 2022)

Berdasarkan hasil olah data atau konstruksi data hasil wawancara dengan para informan, hasil observasi serta studi dokumen diketahui bahwa untuk JUT yang sudah dibangun guna mengkoneksikan jalan desa menuju embung dianggap sebagai modal awal untuk memulai menjadikan lokasi tersebut sebagai agroeduwisata. Penciptaan nilai tambah dalam konteks program sejatinya merupakan optimalisasi yang niscaya harus dilakukan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2014). Pariwisata mulai dipandang sebagai alternatif penciptaan pohon ekonomi yang efektif memberikan nilai tambah ekonomi (Rosalino, Luis M and Grilo, 2011). Diharapkan desa dapat dikembangkan menjadi destinasi agroeduwisata. Adapun peta rencana pengembangan lahan agrowisata FMSRB digambarkan pada Gambar 8.



Gambar 8: Peta Rencana Pengembangan Lahan Agrowisata FMSRB
 Sumber: (Dinas Pertanian, 2022)

Berdasarkan hasil olah data atau konstruksi data hasil wawancara dengan para informan, hasil observasi serta studi dokumen lebih lanjut, kegiatan FMSRB oleh berbagai pihak diharapkan diprioritaskan untuk dilanjutkan setelah proyek FMSRB berakhir di akhir tahun 2022. Diketahui pelaksanaan program FMSRB ditujukan guna pengendalian banjir dalam bentuk konservasi lahan (Dinas Pertanian, 2022). Pelaksanaan program FMSRB mengutamakan kegiatan-kegiatan penanaman lahan kritis dengan tanaman keras seperti durian, petai, cengkeh, dan lain sebagainya. Cara konservasi lahan lainnya juga dilakukan dengan pengaturan kondisi kemiringan lahan dengan metode terasering. (Stufflebeam, n.d.) (Mufid, 2020). *Input Evaluation* adalah penilaian terhadap alternatif yang digunakan kemudian menentukan instrumen serta menetapkan sumberdaya yang dibutuhkan dalam rancangan program. Selain sumberdaya yang dikerahkan dalam program FMSRB meliputi materi/dana dan tenaga seperti fasilitator, tim teknis, poktan sudah cukup besar dan dianggap sebagai masukan dalam mendukung kegiatan FMSRB ini.

Process Evaluation (Evaluasi Terhadap Proses)

Process yakni evaluasi terhadap proses yang mana prinsipnya memberikan penilaian atas implementasi program yang mengacu dari kerangka kerja serta menjelaskan dampak langsung maupun tidak langsung dari program. Membahas bagaimana teknis kriteria penerima kegiatan FMSRB dan bagaimana pendekatan program FMSRB ini. Dalam rangka menjalankan program FMSRB, ada struktur kerja dari Dinas Pertanian sampai ke kelompok tani. Dimulai dari Dinas Pertanian, kemudian terdapat konsultan selaku pembantu dalam urusan pengadaan bibit, kemudian ada pendamping/fasilitator FMSRB sebagai pendamping kelompok tani ketika pelaksanaan FMSRB berlangsung dan sebagai unit pelaksana yaitu kelompok tani. Di sini pendamping memberikan pendampingan atau yang bisa dikatakan training untuk meningkatkan kapasitas para kelompok tani, dan juga melakukan studi banding untuk pemahaman menanam di lahan. Studi banding ke Denpasar. Pernah juga kelompok tani ke Serang untuk melihat bagaimana caranya pembuatan terasering. Selama pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dilakukan pendamping ke kelompok tani, dan hasilnya kelompok tani pun paham akan teknis dari pedoman yang harus dilaksanakan di FMSRB tersebut. Bukti bahwa petani sudah memahami, yakni dari terasering yang sudah dibuat menurut penilaian konsultan pusat sudah dinilai akan berfungsi dengan baik dalam mencegah erosi.

Garis struktural atau organisasi pada program FMSRB ini terdapat koordinasi dan sinergitas. *Collaborative governance* adalah tatanan pemerintahan yang membutuhkan keterlibatan semua pihak yakni *government, civil society, dan private sector*. Hal itu guna mengedepankan kepentingan *society*. *Collaborative governance* adalah langkah yang bertujuan pada optimalisasi peran (UNDESA, 2006), (Tando et al., 2020), (Camilleri & Falk, 2013). Dalam FMSRB kelompok tani didampingi oleh pendamping atau fasilitator kemudian fasilitator bekerjasama dengan konsultan di bawah Kementerian Pertanian, dan konsultan bekerja dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang selaku penanggungjawab di daerah. Dalam penguatan kelompok tani, diperlukan pendamping atau fasilitator yang mempunyai *background* pendidikan atau pengalaman di bidang pertanian. Jika seorang pendamping difungsikan untuk melakukan penguatan kelompok tani dalam hal teknis, sosial, dan ekonomi, tentunya jika tidak memiliki *background* pendidikan atau pengalaman di bidang pertanian akan berdampak tidak optimalnya pelaksanaan program FMSRB ini.

Dalam pemilihan kelompok tani, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang mengacu dari peta lahan kritis atau potensial kritis, kelompok tani yang dipilih yang terdapat dalam wilayah tersebut atau bisa juga atas ajuan dari kelompok tani, namun keputusan akhir tetap dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang selaku pemilik otoritas. Kemudian dalam hal kelompok tani yang harus memiliki pengetahuan teknis, sosial, dan ekonomi, fasilitator/ pendamping telah intens memberikan pelatihan. Hasilnya kelompok tani secara bertahap mampu memahami teknis, hingga kelompok mampu berpartisipasi dalam kegiatan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Dampak positif dari program-program FMSRB adalah menjadikan kelompok tani lebih produktif. Dari hibah bibit cabai-cabaian dan sawi, kelompok tani mampu memanfaatkannya dengan baik.

Kemudian terkait aspek kepatuhan, program-program FMSRB, diketahui telah dilaksanakan sesuai standar Petunjuk Teknis (JUKNIS), seperti proses pembangunan JUT harus diselesaikan dalam waktu 90 hari, dan program hibah bibit harus diselesaikan dalam waktu 20 hari sejak pengajuan, namun yang menjadi hambatan dalam program ini hanya di masalah waktu pencairan dana yang diajukan kelompok tani, terkadang tidak sesuai jadwal. Gambar 9 merupakan bentuk Kontrak Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) FMSRB yang didokumentasikan.



Gambar 9: Kontrak Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) FMSRB
 Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Terkait dengan dampak yang diciptakan, berdasarkan data Statistik Pertanian Hortikultura yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 2019-2020. Untuk bibit musiman hibah dari program FMSRB seperti cabai besar, cabai rawit dan sawi mengalami peningkatan luas panen adapun seperti sawi yang stagnan dalam luas panen, sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1: Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim
 Menurut Jenis tanaman Tahun 2019–2020

No	Jenis Tanaman	Satuan Unit	Tahun	
			2019	2020
1	Cabai Besar	Ha/Ha	288	274
2	Cabai Rawit	Ha/Ha	185	217
3	Sawi	Ha/Ha	73	73

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang Tahun 2022

Data statistik pertanian hortikultura yang telah diterbitkan dari badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 2019-2020 (BPS Pandeglang, 2022). Untuk bibit musiman hibah dari program FMSRB seperti cabai besar, cabai rawit dan sawi mengalami peningkatan produksi panen. Hanya seperti sawi yang mengalami penurunan dalam produksi panen dan menjadi bahan evaluasi FMSRB dan menjadi evaluasi program lanjutan FMSRB jika dilaksanakan kembali, sebagaimana data pada tabel 2.

Tabel 2: Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis tanaman Tahun 2019–2020

No	Jenis Tanaman	Satuan Unit	Tahun	
			2019	2020
1	Cabai Besar	Kw/Qui	33692	37426
2	Cabai Rawit	Kw/Qui	24153	38107
3	Sawi	Kw/Qui	4608	2821

Sumber: (BPS Pandeglang, 2022)

Berdasarkan temuan–temuan hasil penelitian di atas diketahui bahwa partisipasi penuh kelompok tani dalam kegiatan FMSRB hingga selesai dapat berkontribusi sedikitnya 20 persen untuk kegiatan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan (BPS Pandeglang, 2022). Kemudian juga menjadikan sektor pertanian pun menjadi sektor strategis unggulan setelah diterapkannya program pengelolaan sumber daya air atau *integrated water resource management* (IWRM). Hal ini selaras dengan (Mufid, 2020) dan Stufflebeam (1967) bahwa evaluasi terhadap proses prinsipnya memberikan penilaian atas implementasi program yang mengacu dari kerangka kerja serta menjelaskan dampak langsung maupun tidak langsung dari program.

Product Evaluation (Evaluasi Terhadap Hasil)

Product yakni evaluasi terhadap hasil, yang mana menilai ketercapaian dampak yang diharapkan kemudian mengarahkan proses agar tidak keluar dari program yang telah ditetapkan serta menentukan keefektifan dari suatu program (Siswadi et al., 2020). Membahas sejauh mana Kemandirian petani, Penentuan para pihak (stakeholders kunci) untuk melanjutkan program FMSRB ini dan bagaimana evaluasi program FMSRB selama ini yang sudah berjalan sejak tahun 2018–2022. Ketika program ini berjalan seperti adanya lahan terasering mampu mengurangi *Run Off* yang artinya mengurangi panjang lereng, dan dapat menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah, sehingga peluang terjadinya erosi berkurang. Terkait dengan (Dunn, 2003) dikutip dari (Maulana, Delly & Nugroho, 2019) evaluasi kebijakan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. (Stufflebeam, n.d.) (Mufid, 2020) menjelaskan bahwa *product evaluation* membantu menjaga agar proses tidak keluar dari program yang telah ditetapkan dan menentukan keefektifan dari suatu program.

Berdasarkan hasil olah data atau konstruksi data hasil wawancara dengan para informan, hasil observasi serta studi dokumen diketahui bahwa dari program FMSRB ini mampu mendorong peningkatan pendapatan kelompok tani, hal itu dilihat dari meningkatnya luas lahan panen dan meningkatnya produksi kelompok tani dari hibah bibit yang diberikan program FMSRB. Hal itu pun dibantu dengan Jalan Usaha Tani (JUT) sebagai sarana penunjang kelompok tani dalam bekerja. Dalam efektifitas pengelolaan konservasi lahan, dapat meminimalisir resiko terjadinya banjir dan erosi di lahan Desa dengan dibuatnya terasering dan embung. Namun disisi itu perlu adanya operasionalisasi, pemanfaatan, dan pemeliharaan atau *maintenance* hasil program FMSRB seperti Embung,

Jalan Usaha Tani (JUT), Terasering, dan bibit bibitan dari program FMSRB ini. Kunci keberlanjutan program FMSRB ini sebetulnya adalah kolaborasi pemerintah daerah dengan multi stakeholder. Tentunya cita-cita dan harapan para kelompok tani yang sudah terbangun dari program FMSRB ini, hal itu selaras dengan konteks inovasi pemerintah (Muluk, 2008) kemudian (Hartley, 2005), seperti rencana pembangunan Agroeduwisata/Agrowisata perlu dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Maka dari itu jika program FMSRB ini akan berakhir, Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu memanfaatkan warisan sarana prasarana dari FMSRB ini dengan melakukan operasionalisasi, pemanfaatan, dan pemeliharaan, kemudian mencari stakeholder yang potensial dalam melanjutkan program FMSRB ini, dengan kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder lain (konsep governance) (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014) (Bunnell, Ann Miller, Phelps, & Taylor, 2013).

Terkait dengan itu berdasarkan temuan-temuan penelitian yang teridentifikasi, adapun pemetaan *exit* strategi keberlanjutan konservasi lahan dalam strategi jangka pendek, strategi jangka menengah dan strategi jangka panjang yang berhasil dipetakan seperti pada Tabel 3.

Tabel 3: Pemetaan Exit Strategi Keberlanjutan Konservasi Lahan

Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan	Strategi Jangka Pendek (1 tahun)	Strategi Jangka Menengah (1-5 tahun)	Strategi Jangka Panjang (5-15 th)
1. Keberlanjutan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman Bibit Tanaman multiguna - Kontur lahan metode Terasering (Teras individu & Teras Bangku) - Sumur resapan - Pupuk Organik dan Pupuk NPK - Penentuan Pola Tanam yang tepat - 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan tanaman multiguna - Pemeliharaan kontur lahan terasering - Pemeliharaan dan pengembangan sumur resapan - Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) - Lubang Biopori - Pembuatan saluran di sepanjang kontur yang berfungsi sebagai saluran air untuk mengisi persediaan air dalam tanah - Metode vegetatif dengan tanaman penutup tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas cakupan lahan konservasi - Menambah dan memperbaiki tanaman multiguna - Peningkatan dan pengembangan kontur lahan terasering - Pengembangan UPPO
2. Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Jalan Usaha Tani - Pembangunan Jaringan Irigasi Desa - Pembangunan Embung Pertanian - Bantuan Motor Roda 3 - Pembangunan jaringan dam parit 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan hasil konstruksi penunjang pertanian - Optimalisasi Koperasi dan BUMDes - Pembangunan dan Pengembangan Project CDU (Agroekowisata) - Pengadaan peralatan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan pembangunan konstruksi penunjang pertanian - Pembangunan pasar tani - Pembangunan sentra/pusat pengolahan hasil pertanian program FMSRB

Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan	Strategi Jangka Pendek (1 tahun)	Strategi Jangka Menengah (1-5 tahun)	Strategi Jangka Panjang (5-15 th)
3. Keberlanjutan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Lembaga Tani (Poktan) - Musyawarah kelompok tani - Pemberdayaan masyarakat - Pembangunan pusat pelatihan lapangan - Pemberdayaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama pemanfaatan hasil pertanian konservasi lahan dengan beberapa stakeholder - Forum diskusi lintas kelembagaan Tani - Benchmark penguatan lembaga tani - Satgas dan media centre lahan kritis - Kolaborasi stakeholder (Masyarakat, Pemerintah, Swasta, Akademisi, NGO, Media) dalam pengelolaan konservasi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan jaringan sosial dalam kegiatan konservasi lahan pertanian - Pemanfaatan dan pengembangan hasil kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan konservasi lahan

Sumber: Peneiliti, 2022

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis CIPP (*Context, Input, Process, Product*), bahwa adanya program FMSRB ini mampu menjawab berbagai masalah lahan-lahan kritis yang terdapat program FMSRB ini. Program seperti hibah bibit tanaman/sayuran dengan melakukan *Cross Check* terlebih dahulu kelayakan struktur tanah untuk meningkatkan produktivitas hasil panen kelompok tani dan sudah terbukti hasilnya bahwa adanya peningkatan pendapatan petani dari hasil panen yang meningkat. Kemudian pembangunan teras dapur (terasering) dan embung sebagai salah satu wujud utama program FMSRB untuk efektifitas dalam pengelolaan konservasi lahan sehingga meminimalisir resiko terjadinya banjir dan erosi di lahan, kemudian program pendukung FMSRB yaitu pembangunan JUT atau Jalan Usaha Tani untuk memudahkan akses kelompok tani ke perkebunan dan program-program lainnya. Tahapan terakhir perencanaan pembangunan daerah agroeduwisata/agrowisata yang akan dilaksanakan oleh kelompok tani berkat hasil dari FMSRB ini. Program ini dipandang perlu diprioritaskan untuk dilanjutkan setelah proyek ini akan berakhir di akhir tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Pandeglang tentunya perlu adanya langkah serius dalam melanjutkan program ini sebagaimana sudah dijelaskan sudah memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kelompok tani. Maka dari itu perlu adanya keterlibatan kerjasama dengan para stakeholder untuk melanjutkan program FMSRB ini baik itu antara dari pihak pemerintah maupun swasta.

Pola keberlangsungan dan pengembangan FMSRB diharapkan diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dengan melibatkan berbagai instansi serta kelompok masyarakat yang konsen pada pada usaha konservasi lahan

konsep *collaborative governance* dalam upaya pengentasan banjir seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, petani/kelompok tani, NGO lingkungan nasional dan lokal, Pihak swasta, Perguruan tinggi/akademisi.

PERNYATAAN RESMI

Terimakasih kami ucapkan pada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian tentang Evaluasi Program FMSRB (*Flood Management in Selected River Basins*) di Kabupaten Pandeglang yakni Pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Fasilitator Program FMSRB serta kelompok tani sasaran program.

REFERENSI

- Abbott, K. W., Genschel, P., Snidal, D., & Zangl, B. (2016). Two Logics of Indirect Governance: Delegation and Orchestration. *British Journal of Political Science*, 46(4), 719–729. <https://doi.org/10.1017/S0007123414000593>
- BPS Pandeglang. (2022). *Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2022*. Diambil dari <https://pandeglangkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/e18db00abe03757561b55b72/kabupaten-pandeglang-dalam-angka-2022.html>
- Budi Winarno. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Bunnell, T., Ann Miller, M., Phelps, N. A., & Taylor, J. (2013). Urban development in a decentralized Indonesia: Two success stories? *Pacific Affairs*, 86(4), 857–876. <https://doi.org/10.5509/2013864857>
- Camilleri, J., & Falk, J. (2013). Economic Governance. *Worlds in Transition*, (February). <https://doi.org/10.4337/9780857930804.00010>
- Damara, R. J. (2017). Konservasi Lahan Pertanian Di Desa Wonolelo Dan Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. *Geo Educasia*.
- Dinas Pertanian. (2022). *Master KAK FMSRB 2022 - Exit Strategy & Kemandirian Petani Konservasi*. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartley, J. (2005). Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. *Public Money and Management*, 25(1), 27–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/J.1467-9302.2005.00447.X>
- Irawan Denny. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12.
- kompas.tv. (2020). *FMSRB: Konservasi Lahan Menuju Daulat Pangan dan Daulat Ekonomi*. Diambil dari <https://www.kompas.tv/article/130663/fmsrb-konservasi-lahan-menuju-daulat-pangan-dan-daulat-ekonomi>

- Kurnia Undang, dkk. (2011). *Sifat Fisik Tanah dan Metode Analisisnya*. Bogor: Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.
- Maulana, Delly & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. In CV. AA. RIZKY. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mufid, M. (2020). Evaluasi Model Context, Input, Process and Product (CIPP) Program Baca Tulis Al-Qur'an di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. *Quality*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.21043/quality.v8i1.6908>
- Muluk, Kh. M. . (2008). *KNOWLEDGE MANAGEMENT (Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah)*. 1–300.
- Nugroho, A., & Habibi, F. (2019). Camat Sebagai Pengawal Agenda Pembangunan (Studi Pada Tugas dan Fungsi Camat di Pemerintah Kabupaten Pandeglang). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 29–47. <https://doi.org/10.30656/sawala.v7i1.1069>
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2014). *OECD Territorial Reviews*. 413. Diambil dari <http://bookshop.europa.eu/en/oecd-tourism-trends-and-policies-2014-pbKE0113732/>
- Refinzar, R., Marpaung, Z. S., Khairunnas, K., & Ismail, R. G. (2023). Deliberative Planning Analysis: Study on Policy-Making Inhibiting Factors in Musrenbangdes. *Jurnal Public Policy*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.5940>
- Ricardo S. Morse, J. S. (2012). Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education*, 18, 565–583. <https://doi.org/10.1080/15236803.2012.12001700>
- Rosalino, Luis M and Grilo, C. (2011). What drives visitors to Protected Areas in Portugal: accessibilities, human pressure or natural resources? *Journal of Tourism and Sustainability*, 1(1), 3–11.
- Rusdiyana, Nurwahyunani, A., & Marianti, A. (2021). Analisis Peran Petani Dalam Konservasi Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal. *indonesian Journal of Conservation*, 10(1).
- Salomo, R. O. Y. V, Jannah, L. M., & Muslim, M. U. H. A. (2008). *Evaluasi Pemekaran Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2007* 1. 15.
- Siswadi, Y., Haughty, G. S., & Agustina, T. (2020). Implementation of the CIPP evaluation model in Indonesian nursing schools. *Jurnal Ners*, 14(3), 126–131. <https://doi.org/10.20473/jn.v14i3.17046>
- Stufflebeam, D. L. (n.d.). *The CIPP Model For Evaluation, dalam Daniel L. Stufflebeam, dkk. (eds), Evaluation in Education and Human Service*. Boston: Kluwer Academic Publisher.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, N., Balitklimat, & Heryani, N. (2014). Teknologi Konservasi Tanah Dan Air Untuk Mencegah Degradasi Lahan Pertanian Berlereng. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*.

- Syahroni, F., & Pribadi, U. (2023). *Implementation of The Spice Route Program in Aceh Province: Opportunities and Challenges as a World Cultural Heritage*. 10(1), 72–91.
- Tando, C. E., Sudarmo, & Haryanti, R. H. (2020). Jurnal Ilmu Sosial Collaborative Governance In Public Service In Indonesia: *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(2), 144–163. <https://doi.org/10.14710/jis.18.2.2019.144>
- UNDESA. (2006). *Innovations in Governance and Public Administration: Replicating what works*. New York.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik Proses dan Analisa*. Jakarta: Intermedia.
- Wijayanto, H., Wibowo, A., & Anantayu, S. (2021). Perilaku Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Kawasan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Kabupaten Karanganyar. *Agri Humanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*.